

PENYEBARAN BERITA HOAKS PADA ERA MENJELANG PEMILU 2024

**Muhammad Khoir Pahlepi¹, Agustini Br Sinaga², Alan Kibar Manik³, Amira Syifani⁴,
Anggun Lutvhita Siregar⁵, Dear Ezra Br. Sipayung⁶, Debora Siregar⁷, Nurul Hijrah⁸,
Ririn Ayu Simanjuntak⁹, Waliyul Maulana Siregar¹⁰**

pahlepikhoir@gmail.com¹, agustinisinaga98@gmail.com², alankibarmanik2022@gmail.com³,
amirasyifanii@gmail.com⁴, luthvitaanggun@gmail.com⁵, dearezrasipayung@gmail.com⁶,
deborasiregar05@gmail.com⁷, nurulhijrah2345@gmail.com⁸,
simanjuntakririnayu@gmail.com⁹, waliyulmaulana@gmail.com¹⁰

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Persentase penyebaran berita hoaks menjelang pemilu kian meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan manusia untuk mencari informasi yang sejalan dengan keyakinan dan sikap yang mereka miliki. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi serta kebijakan dalam penanganan berita hoaks. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah diperlukan kesadaran individu mengenai dampak penyebaran berita hoaks, serta pentingnya peran pemerintah dalam upaya pemutusan rantai penyebaran berita hoak. Adapun yang dapat dilakukan pemerintah yaitu melakukan penegakan hukum, menjalin kerja sama dengan media sosial serta platform digital lainnya, serta melakukan sosialisasi dan juga memberikan edukasi kepada para masyarakat.

Kata Kunci: Berita Hoaks, Pemilu 2024

ABSTRACT

The percentage of hoax news spreading ahead of the election is increasing. This is due to the human tendency to look for information that is in line with their beliefs and attitudes. This research aims to find solutions and policies in handling hoax news. In this case, researchers used qualitative methods. The results obtained from this research are the need for individual awareness regarding the impact of spreading hoax news, as well as the importance of the government's role in efforts to break the chain of spreading hoaxes. What the government can do is enforce the law, collaborate with social media and other digital platforms, as well as carry out outreach and provide education to the public.

Keywords: Hoax News, Election 2024

PENDAHULUAN

Jelang pemilu 2024, banyak terjadi problematik yang mengakibatkan kerusuhan dan kerugian bagi masyarakat, salah satunya, yaitu penyebaran hoaks dan kampanye hitam di sosial media yang menjadi permasalahan krusial selama Pemilu karena mampu menurunkan integritas dan mencederai nilai demokrasi, sehingga pemerintah perlu membangun solusi inovatif untuk mencegah dan menanggulangnya. Pada era digitalisasi masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, terutama saat Pemilu hoaks biasanya tersebar dengan cepat dan masif. Hoaks Pemilu menjadi permasalahan krusial yang harus segera diatasi karena merusak pikiran masyarakat, merusak citra lawan politik, menciptakan fragmentasi sosial, dan memunculkan kegelisahan publik yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan kepada pihak otoritas, menurunkan integritas dan nilai Demokrasi.

Menurut Paskarina, C.(2018), pada era demokratisasi masyarakat bebas menyampaikan pendapat, mendukung dan mengkritik peserta Pemilu, salah satunya melalui media sosial. Media ini juga digunakan oleh penyelenggara Pemilu untuk memberikan literasi dan sosialisasi, sementara peserta Pemilu menggunakan media sosial untuk menyampaikan program dan gagasan serta membangun citra diri. Hal ini menyebabkan media sosial memegang peran strategis untuk mentransfer informasi, penyampaian aspirasi, dan pendidikan pemilih. Mudah dan murah nya penggunaan media sosial dalam penyampaian informasi menyebabkan terus meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia yang secara otomatis juga melalui media penyebaran berita hoax sangat mudah terjadi, sehingga menimbulkan kegaduhan diantara berbagai pihak.

Hoaks dalam konteks Pemilu tidak hanya sekedar permasalahan informasi palsu, namun menjadi ancaman serius terhadap kestabilan nasional. Dampak yang ditimbulkan dapat menyebar dalam berbagai aspek, seperti pertahanan keamanan, ideologi politik, dan moral masyarakat. Hoaks dapat memberikan gangguan terhadap pertahanan keamanan negara karena masyarakat dapat terpengaruh akibat informasi yang tidak akurat. Hal ini dapat melemahkan kesatuan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman luar atau dalam negeri sehingga menghadirkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Artinya, hoaks dapat menjadi senjata yang dapat merusak kekuatan pertahanan nasional.

Penyebaran hoaks dalam masyarakat dalam Pemilu biasanya disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk mencari informasi yang sejalan dengan keyakinan dan sikap yang mereka miliki. Hal ini mencerminkan adanya confirmation bias, yaitu ketika individu cenderung menyebarkan informasi yang menguatkan pandangan mereka tanpa mempertimbangkan kebenaran berita tersebut. Terlebih lagi, jika stakeholder yang bersangkutan, seperti lembaga pengawas dan pihak berwenang, belum secara massif dan efektif menanggapi hoaks, maka dampaknya bisa sangat merugikan. Hoaks yang tidak terkendali dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara Pemilu, mengancam keberlanjutan proses demokratisasi. Hoaks yang ditujukan kepada penyelenggara Pemilu juga memiliki tujuan khusus. Hoaks sering digunakan untuk membentuk opini masyarakat sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Strategi penyebab kekacauan ini melibatkan manipulasi informasi dan penciptaan narasi yang dapat merusak legitimasi proses pemilihan. Oleh karena itu, mendeteksi dan menanggulangi hoaks perlu menjadi prioritas bagi penyelenggara Pemilu dan pemerintah.

Penyusunan strategi yang cepat dan responsif, terutama di era media sosial dan internet, sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi. Untuk mengatasi informasi palsu secara efektif, strategi ini perlu

mendukung pendidikan literasi digital, pendekatan pencegahan, dan perluasan kapasitas. Penyelenggara pemilu juga perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, kerja kolaboratif dengan platform media sosial dan organisasi berita juga dapat membantu mengidentifikasi dan secara aktif mengatasi permasalahan ini.

METODE

Metode penelitian pada artikel ini adalah kualitatif. Dapat diartikan, penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Penulis juga menggunakan studi literatur dengan mencari sumber-sumber buku yang relevan. Penelitian kajian literatur adalah suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan publikasi pustaka lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu (Marzali, 2017). Pengumpulan data kajian literatur dilakukan melalui kajian pustaka dari sumber-sumber rujukan yang relevan dari buku dan jurnal untuk dianalisis dan diklasifikasi. (dalam Marinu Waruwu 2023:2897). Materi yang sudah di dapat dari berbagai sumber buku, jurnal, dan lainnya, kemudian dianalisis secara kritis yang mendalam agar buah pikiran yang dicari dapat tercapai hasilnya.

PEMBAHASAN

Secara kumulatif, sejak Agustus 2018, Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan 2.075 isu hoaks dalam kategori pemerintahan. Paling banyak merujuk pada akun palsu pejabat pemerintah pusat dan daerah. Selain itu ada beberapa informasi menyesatkan mengenai kebijakan pemerintah terkini. Sementara itu pada urutan ketiga tertinggi temuan isu hoaks, ada kategori penipuan. Tim AIS Kementerian Kominfo mengidentifikasi sebanyak 1.823 isu hoaks. Konten ini didominasi oleh tautan pishing dan penipuan serta penipuan dengan menggunakan nomor ponsel.

Penyebaran berita hoaks terhadap pejabat pemerintahan tentunya memberi dampak besar terhadap pelaksanaan pemilu, terutama terhadap pemilih pemula. Dalam hal ini Sari, N. A. (2019:56) menjelaskan beberapa dampak berita hoaks terhadap pemilih pemula, di antaranya: (1) Sulit membedakan berita hoaks dan asli. Dampak yang nyata yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya terkait dengan berita hoaks adalah sulit membedakan antara berita asli dengan berita palsu (hoaks), terutama di kalangan pemilih pemula. Banyaknya informasi yang tersebar luas mengakibatkan para pemilih pemula sulit untuk menentukan berita yang benar dan berita hoaks. (2) Mudah terprovokasi. Pemilih pemula masih memiliki jiwa yang labil. Orang-orang berjiwa labil sangat mudah untuk terprovokasi. Hal ini dikarenakan kondisi jiwa mudanya yang masih tinggi akan rasa keingintauannya. Informasi sekecil apapun yang mereka terima akan dapat dengan mudah masuk ke bagian pemikiran mereka. Sehingga dapat memicu rasa suka atau tidak suka terhadap salah satu calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota legislatif. (3) Mudah membenci. Sebagai masyarakat yang tidak lepas dari proses interaksi sosial. Ada begitu banyak proses interaksi sesama masyarakat terjadi, mengenal beberapa tokoh yang ada dan bahkan tak jarang melalui proses interaksi tersebut dapat menimbulkan kebencian kepada seseorang ataupun lembaga. Membenci sesuatu pastinya ada alasan tersendiri baik yang didapatkan melalui informasi-informasi maupun dengan fenomena yang terjadi pada masa yang dapat mereka rasakan. (4) Perubahan pilihan/dukungan. Di Indonesia sendiri, perubahan pilihan atau dukungan politik adalah hal yang sering kita jumpai, apalagi menjelang

hari pemilu terjadi. Perubahan pilihan/dukungan dikalangan para pemilih pemula sangat rentan terjadi, dimana yang semulanya mendukung satu calon berpindah kepada calon lainnya. Mereka memiliki alasan-alasan tersendiri kenapa mendukung atau tidak mendukung lagi terhadap calon-calon yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tentunya ada faktor-faktor yang melandasi penyebaran berita hoaks. Dalam hal ini Jafar, W.A (2019:55) telah memaparkan beberapa faktor yang melandasi penyebaran berita hoaks, yaitu: (1) Faktor perkembangan teknologi dan informasi. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi sering disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Peneliti Populi Center Rafif menyatakan informasi yang mengalir di media sosial yang ada tidak semuanya fakta karena media sosial merupakan pasar bebas yang informasi didalamnya tak tersaring. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi publik terhadap pesan-pesan di media sosial, sehingga berita hoaks yang beredar banyak dibagikan di media sosial pribadinya. (2) Faktor politik. Kondisi politik suatu daerah sangat mempengaruhi tersebarnya berita hoaks. Daerah yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi sangat rentan menjadi sasaran berita hoaks. Menurut Danarka Sasongko, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, fenomena merebaknya berita hoaks di media sosial meningkat tajam menjelang pesta demokrasi baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Berita hoaks sengaja disebar untuk dijadikan senjata dalam menjatuhkan lawan politiknya, sehingga pihak lawannyapun melakukan hal yang sama juga. (3) Faktor ketegasan hukum. Supremasi hukum mutlak dibutuhkan agar hukum bisa efektif diterapkan. Sebagus apapun hukum yang ada apabila dalam implementasinya masih tebang pilih maka hukum tersebut tidak akan efektif dalam mengatasi kejahatan. Demikian juga dalam kasus penyebaran berita hoaks, hukum harus bisa menindak sampai keakar akarnya. Bukan hanya pembuat penyebaran dan pembuat berita hoaks saja yang dihukum tapi dalang dibalik penyebaran berita hoaks tersebut harus diberikan sanksi juga. Ketidak tegasan dalam menindak pihak pihak yang terlibat dalam kasus hoaks tersebut bisa menyebabkan berita hoaks yang lain tumbuh dengan subur. (4) Faktor ketidaktahuan. Salah satu penyebab beredarnya berita hoaks adalah ketidaktahuan dari orang yang menshare berita tersebut adalah berita hoaks. Hal ini terjadi karena berita tersebut diperoleh dari orang yang ia percaya sehingga ia menshare tanpa melakukan pemeriksaan ulang terlebih dahulu padahal orang tersebut juga memperoleh dari sumber yang tidak pasti kebenarannya.

Penyebaran berita hoaks merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Berita hoaks dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat, seperti keresahan, ketakutan, dan bahkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.

Besar dampak ditimbulkan dari pemberitaan bohong (HOAKS) ini membuat Pemerintah mengambil langkah tegas mengeluarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang dimana pada pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 Milyar. Dengan dikeluarkannya undang – undang ini, penyebar berita hoaks dapat dijerat dengan masa hukuman serta hal tersebut juga mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana yang dimana pada pasal 14 ayat 1 berbunyi demikian “Barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoaks atau informasi palsu. Dalam menangani kasus penyebaran berita palsu, aparat penegak hukum yang dapat memberantas berita palsu (hoaks) tersebut antara lain pihak Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bisa menjadi pihak yang turut dalam menanggulangi penyebaran berita palsu (hoaks). Salah satu upaya tersebut adalah dengan membentuk Tim Cyber Crime Polri. Tim ini bertugas untuk mendeteksi dan menindak pelaku penyebaran berita hoaks atau informasi palsu di media sosial. Upaya penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoaks atau informasi palsu perlu didukung oleh kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa penyebaran berita hoaks atau informasi palsu merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan media sosial untuk mendeteksi dan menghapus konten berita hoaks atau informasi palsu. Media sosial memiliki teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi konten hoaks, seperti mesin pencari fakta (fact-checker). Pemerintah dapat bekerja sama dengan media sosial untuk mengembangkan teknologi ini agar lebih efektif. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya berita hoaks atau informasi palsu. Salah satu contoh kerja sama pemerintah dalam bidang fact checking adalah melalui program "Jaringan Jurnalis Independen untuk Demokrasi (JIDD)" yang diluncurkan oleh Kominfo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam melakukan fact checking. Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan platform cekfakta.id yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memeriksa kebenaran suatu informasi. Platform ini berisi kumpulan fakta-fakta yang telah diverifikasi oleh tim fact checking independen.

Pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi sebagai upaya pencegahan informasi hoaks di media sosial online, dengan cara ini kita mampu menanamkan nilai – nilai / norma – norma yang baik kepada pengguna media sosial bahwa informasi yang diterima tidak serta merta dalam artian yang baik semuanya ada juga informasi yang mengandung isu sara dan ujaran kebencian serta mengandung informasi hoaks atau bohong, maka dalam hal ini dapat diharapkan mampu mengatasi tindakan-tindakan serupa (Nurlatun, Naryoan, dan Pangemanan.2021).

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya berita hoaks atau informasi palsu juga merupakan upaya penting untuk mengatasi penyebaran berita hoaks atau informasi palsu. Masyarakat perlu diajarkan untuk berpikir kritis dan teliti dalam menerima informasi di media sosial. Masyarakat juga perlu diajarkan untuk melaporkan konten berita hoaks atau informasi palsu kepada pihak yang berwenang. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti media massa, sekolah, dan komunitas. Sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat terhindar dari penyebaran berita hoaks atau informasi palsu.

Hal di atas sejalan dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Juditha, C. (2018:42), yaitu ada tiga pendekatan penting yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita hoaks di masyarakat yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi. Pendekatan kelembagaan, dengan terus menggalakkan komunitas anti hoaks. Dari sisi pendekatan teknologi, dengan aplikasi hoaks cheker yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengecek kebenaran berita yang berindikasi hoaks. Pendekatan literasi, dengan gerakan anti berita hoaks maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan, bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non pemerintah lainnya.

Kementerian Kominfo juga membentuk badan independen untuk melakukan pengecekan apakah berita tersebut bersifat hoaks atau tidak. Badan tersebut mengelola aplikasi pengecekan hoaks yang terakses ke seluruh media online, mengaktifkan cyber GPR untuk share informasi melawan berita hoaks di setiap instansi pemerintah pusat hingga tingkat daerah, meminimalisir keberadaan akun anonim dengan cara verifikasi akun digital menggunakan identitas asli masyarakat Indonesia terutama pada website atau layanan internet dengan lalu lintas data yang tinggi. Semua institusi, baik pemerintah maupun swasta juga terus meningkatkan upaya kampanye anti hoaks dan mendukung konten-konten positif bagi masyarakat.

Berikut adalah beberapa contoh tindakan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi penyebaran berita hoaks atau informasi palsu:

1. Pada tahun 2017, pemerintah membentuk Tim Cyber Crime Polri untuk mendeteksi dan menindak pelaku penyebaran berita hoaks atau informasi palsu di media sosial.
2. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Layanan Informasi dan Transaksi Elektronik untuk Pengendalian Informasi yang Menyesatkan. Peraturan ini mengatur tentang mekanisme pelaporan konten berita hoaks atau informasi palsu kepada pemerintah.
3. Pada tahun 2020, pemerintah bekerja sama dengan Facebook untuk mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi konten berita hoaks atau informasi palsu.
4. Pada tahun 2021, pemerintah meluncurkan program edukasi tentang bahaya berita hoaks atau informasi palsu kepada masyarakat.

Penyebaran berita hoaks atau informasi palsu di media sosial online merupakan masalah yang kompleks dan perlu ditangani secara komprehensif. Tindakan kebijakan yang tepat dan kesadaran masyarakat yang tinggi dapat membantu menekan penyebaran berita hoaks atau informasi palsu di media sosial online. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran berita hoaks atau informasi palsu:

1. Cek kebenaran informasi; Jangan langsung percaya dengan informasi yang diterima di media sosial. Cek kebenaran informasi dengan mencari sumber lain yang lebih kredibel.
2. Waspada dengan judul berita yang provokatif; Judul berita yang provokatif biasanya merupakan tanda bahwa berita tersebut adalah hoaks.
3. Laporkan konten hoaks; Jika menemukan konten berita hoaks atau informasi palsu, segera laporkan kepada pihak yang berwenang.

Selain langkah-langkah di atas, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digitalnya (Tanjung, dkk. 2019). Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang tinggi akan lebih mampu untuk mengidentifikasi dan menghindari berita hoaks atau informasi palsu. Dengan adanya tindakan kebijakan yang tepat dan kesadaran masyarakat yang tinggi, penyebaran berita hoaks atau informasi palsu di media sosial online dapat ditekan.

Dengan meningkatnya literasi digital masyarakat, mereka akan lebih mampu mengidentifikasi dan memverifikasi informasi yang mereka terima. Pemerintah dapat meningkatkan literasi digital masyarakat melalui berbagai program edukasi, seperti sosialisasi, pelatihan, dan kampanye. Program-program tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan memverifikasi informasi, serta cara menggunakan media sosial secara bijak. Salah satu contoh

program edukasi literasi digital yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah program "Digital Sehat" yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan bahaya berita hoax.

KESIMPULAN

Penyebaran berita hoaks menjelang Pemilu kian marak. Akibat dari penyebaran berita hoaks tersebut, banyak sekali permasalahan yang muncul sehingga menimbulkan kerusuhan pada masyarakat. Hoaks dalam konteks Pemilu bukan hanya persoalan informasi palsu, namun menjadi ancaman serius terhadap kestabilan nasional. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dapat menyebar dalam berbagai aspek, seperti pertahanan keamanan, ideologi politik, dan moral masyarakat. Pada era digital seperti saat ini, penyebaran berita hoaks semakin cepat terjadi. Hal ini dikarenakan masyarakat begitu mudah menyebarkan dan menerima informasi dari berbagai penjurur dan kalangan. Sehingga diperlukan kewaspadaan dan kehati-hatian yang lebih pada masyarakat. Penelitian juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih tegas lagi dalam pencegahan dan penanganan kasus penyebaran berita hoaks. Menegakkan UU yang berlaku serta mengadakan sosialisasi mengenai berita hoaks, baik dalam ranah digital maupun non digital merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memutuskan rantai permasalahan berita hoaks.

DAFTAR PUSTAKA

- Jafar, W. A. (2019). Sanksi Penyebar Hoaks Perspektif Hukum Pidana Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 6(1), 49-60.
- Juditha, C. (2018). Interaksi komunikasi hoaks di media sosial serta antisipasinya. *Jurnal Pekommas*. 3(1), 31-44.
- Nurlatun, Naryoan, dan Pangemanan. (2021). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoaks) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado). *Jurnal Governance*. 1(2), 1-8.
- Paskarina, C. et. al. (2018). Edukasi Anti-Hoaks Dalam Pemilu Melalui Metode Debunking. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 2(5), 1-4.
- Tanjung, dkk. 2019. Upaya POLRI Dalam Menanggulangi Berita Hoaks Di Masyarakat. *Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO AAU)*. 1(1), 315-322.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.